

## **BAB II**

### **TINJAUAN BALAPAN MOTOR LIAR OLEH REMAJA DAN PENANGGULANGANNYA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Balap Liar**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata balap atau balapan berarti (lomba) adu kecepatan (mobil atau sebagainya) dalam kata lain yaitu berbalapan memiliki arti saling berlomba adu cepat, saling beradu.<sup>11</sup> Sedangkan kata liar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak menurut aturan (hukum) juga dapat berarti tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang.<sup>12</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa balap liar adalah adu kecepatan antara mobil atau motor (kendaraan bermotor) tanpa izin resmi dan tidak menurut aturan (hukum). Mengapa dikatakan tidak menurut aturan karena aksi balapan ini dilakukan tanpa standart keamanan seperti yang sudah diatur oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pelaku balap liar tidak menggunakan pelindung diri seperti helm, jaket, sarung tangan dan kaca mata pelindung.

Selain itu, kegiatan balap liar ini juga tidak dilakukan di lintasan balapan yang resmi, mereka justru saling adu cepat di jalan-jalan raya yang merupakan fasilitas umum dimana banyak digunakan oleh pengguna kendaraan umum lainnya yang mana fungsi penggunaannya juga tentu tidak ditujukan untuk area berbalapan. Kartini Kartono dalam bukunya menyatakan bahwa kegiatan balap liar ini merupakan bentuk perilaku

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>12</sup> *Ibid*

kenakalan yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta membahayakan diri sendiri dan orang lain.<sup>13</sup> Balap liar pada umumnya menganut peraturan seperti *drag bike* dimana dua motor dipacu di lintasan sepanjang 201 meter.

Berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan bermotor yang dibuat oleh Ikatan Motor Indonesia sebagai organisasi induk yang menaungi atau memfasilitasi industri olahraga otomotif baik motor ataupun mobil Indonesia. Sebenarnya balapan motor merupakan salah satu dari olahraga otomotif, dimana terdapat beberapa jenis yang diantaranya adalah<sup>14</sup> :

1. *Road race*

*road race* merupakan balapan motor dimana dilakukan pada lintasan aspal. *Road race* sendiri memiliki makna “balap jalanan” yang maksudnya balapan yang menggunakan motor produksi massal “bukan *prototype*” seperti di ajang balap dunia *Motogp*, balapan ini dapat dilakukan di jalanan umum namun resmi.

2. *Drag Bike*

*Drag bike* merupakan salah satu kejuaraan dimana pengendara atau joki harus dapat mengendarai sepeda motor yang dibawanya dengan kecepatan tinggi didalam sebuah lintasan pacu aspal tertutup, dimana jalan yang digunakan sebagai lintasan terdiri dari dua buah ruas jalur lurus sejajar yang memiliki panjang yang sama

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, Patologi sosial 3 (Gangguan Kejiwaan), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997 hlm 21

<sup>14</sup> Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor oleh Ikatan Motor Indonesia

3. *Motorcross* Menurut IMI (ikatan motor Indonesia) motorcross adalah kejuaraan *cross country* yang dilaksanakan didalam sirkuit pendek yang berlumpur dengan menggunakan rintangan-rintangan

## 2.2 Kenakalan Remaja

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kenakalan ini diambil dari kata dasar Nakal, yang memiliki pengertian yaitu seseorang yang suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan tidak menurut. Sedangkan untuk arti kenakalan ialah sifat nakal, perbuatan nakal yang dapat mengganggu ketenangan orang lain, atau bisa juga diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyalahi suatu norma yang berlaku atau hidup di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Nakal adalah label yang paling umum diberikan kepada seseorang atau anak-anak yang dinilai sering berulah. Pihak-pihak yang biasanya memberikan pemaknaan tentang perbuatan yang dianggap nakal atau tidak ini adalah mereka yang telah dewasa, tingkah laku anak yang dikatakan nakal tergantung kepada orang-orang yang memandang tindakan dari anak-anak tersebut sebagai sebuah kenakalan. Biasanya nak-anak mempunyai cara sendiri untuk mengungkapkan atau hal yang ingin mereka lakukan dengan tanpa memikirkan apakah perbuatan itu bertentangan dengan norma masyarakat atau tidak sehingga ketika perbuatan telah dilakukan muncullah label nakal pada anak tersebut.

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengertian remaja adalah fase peralihan dari anak menjadi dewasa.<sup>16</sup>

Menurut Hurlock Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi tubuh minat pola perilaku serta juga penuh dengan berbagai masalah-masalah.<sup>17</sup> Oleh karena itu pada masa remaja ini sangat rentan mengalami masalah psikososial, masalah psikosisial ini ialah masalah –masalah psikis atau kejiwaan dimana yang timbul dari akibat suatu terjadinya perubahan sosial. Secara umum mereka dianggap ada pada suatu periode transisi dimana tingkah laku- tingkah laku anti-sosial yang potensialnya disertai pula dengan pergolakan hati atau kekisruhan batin.

Para ahli dalam bidang pendidikan telah sepakat bahwasanya seseorang masuk dalam masa remaja adalah mereka-mereka yang memasuki usia 13-18 tahun. Dimana dalam usia tersebut seseorang telah melewati fase sebelumnya yaitu masa kanak-kanak, tetapi dalam hal ini mereka masih dianggap belum cukup matang untuk dapat dikatakan sebagai atau masuk dalam masa dewasa. Dalam fase atau masa remaja ini mereka berada di dalam masa transisi serta pencarian jati diri, yang karenanya dalam fase ini mereka seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebut dengan *Juvenile delinquent* atau kenakalan remaja.<sup>18</sup> Remaja-remaja yang kerap melakukan suatu kenakalan atau kejahatan dianggap kurang memiliki kontrol diri, atau bahkan justru menyalahgunakan kontrol diri

---

<sup>16</sup> Zakiah Darajad, Pembinaan Remaja, Jakarta : Bulan Bintang, 2005, hlm 38

<sup>17</sup> Sarlito W Sarwono, 2013, Psikologi Remaja, Jakarta, hlm 9.

<sup>18</sup> Dadan Sumara, Remaja dan Penanganannya, Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 4 No. 2 Departemen Kesejahteraan FISIP. Universitas Padjajaran Hal 2

tersebut, mereka juga kerap menegakan standar tingkah laku sendiri, dan mudah meremehkan keberadaan dari orang lain.

Kenakalan remaja merupakan sebuah terjemahan dari bahasa latin yaitu kata “*juvenile delinquency*”. Kata *juvenile* memiliki arti anak-anak, atau sifat yang khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu kata “*delinquere*” dimana memiliki arti terabaikan, mengabaikan, yang kemudia diperluas artinya menjadi jahat, kriminal atau pelanggar aturan atau pembuat ribut.<sup>19</sup> Kata ini memiliki konotasi yang dapat disamakan dengan serangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 Tahun

Menurut Kartono Kartini, kenakalan remaja adalah mereka para anak-anak muda yang kerap kali melakukan kejahatan, dimana hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya. Remaja-remaja ini disebutnya pula sebagai pemuda-pemuda brandalan, atau pemuda aspalan yang berkeliaran di jalan-jalan aspalan, atau anak-anak jahat nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Mereka-mereka ini tidak memiliki pembentukan Ego, hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang dapat dikatakan primitif. Mental dan kemauannya lemah sehingga impuls-impuls atau dorongan-dorongan dan emosinya tidak dapat dikendalikan. kebanyakan usia para remaja ini melakukan suatu kenakalan ada pada usia di bawah 22 Tahun yang dimana angka tertinggi melakukan tindak kejahatannya pada

---

<sup>19</sup> Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta; Amzah, 2010) h. 11

usia 15-19 tahun dan sesudah 22 tahun kejahatan-atau kenakalan akan menurun.

Zakiah Dradjat sendiri membagi kenakalan menjadi, yaitu: kenakalan ringan dimana contoh perilakunya adalah keras kepala, tidak patuh terhadap kedua orangtuanya, sering bolos sekolah serta tidak mau belajar, sering melakukan perkelahian dan berkata-kata tidak sopan, serta cara berpakaian yang mengganggu kenyamanan orang lain. Berikutnya Kenakalan berat dimana contoh perbuatannya ialah melakukan pencurian, fitnah, Merusak barang milik Orang lain, mengikuti balap liar dan minuman keras bahkan berjudi, serta tidak segan melakukan kenakalan Seksual pada lawan jenis, atau bahkan terhadap remaja yang sejenis<sup>20</sup>

Dalam bukunya, Kartini Kartono menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja antara lain:<sup>21</sup>

1. Kebanyakan anak-anak yang melakukan kenakalan ini kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta tuntunan pendidikan orang tua, karena ayah dan ibunya sibuk mengurus permasalahan mereka sendiri
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja ini sehingga keinginan dan harapan mereka tidak tersalurkan dengan atau tidak mendapatkan kompensasinya.

---

<sup>20</sup> Zakiah Dradjat, Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) , hlm.10

<sup>21</sup> Dadan Sumara, Remaja dan Penanganannya, Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 4 No. 2 Departemen Kesejahteraan FISIP. Universitas Padjajaran Hal 3

3. Anak-anak remaja ini tidak mendapatkan latihan fisik serta mental yang diperlukan untuk hidup normal, sehingga dan mereka cenderung tidak dapat mengontrol diri dengan baik mereka tidak terbiasa dengan kedisiplinan

Selanjutnya Kartini Kartono menyatakan penanggulangan kenakalan-kenakalan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu :<sup>22</sup>

1. Tindakan Preventif, dalam tindakan ini dapat dilakukan dengan mendirikan tempat latihan sehingga kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen dapat tersalurkan. Misalnya latihan bermsyarakat, latihan mandiri
2. Tindakan hukuman, dilakukan dengan memberi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga dianggap adil dan dengan cara ini memancing berfungsinya hati nurani remaja-remaja ini untuk dapat hidup susila dan mandiri
3. Tindakan kuratif, usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan anak baik berupa pribadi,familia, sosial, ekonomi dan kultural

## **2.3 Teori Penegakan Hukum**

### **2.3.1. Pengertian Penegakan Hukum**

Secara konkret, Penegakan hukum merupakan berlakunya suatu hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya hukum harus dipatuhi, penegakan hukum ini sebagai sebuah upaya yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 97

untuk mempertahankan serta menjamin hukum positif ditaati secara materiil dengan menggunakan cara-cara prosedural yang ditetapkan pada hukum formal.

Menurut Moeljatno, penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:<sup>23</sup>

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang seharusnya tidak dapat dilakukan yang disertai pula dengan adanya ancaman atau sanksi, dimana sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya;
- b. Menentukan dalam suatu hal apa kepada yang telah melakukan pelanggaran itu dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan;
- c. Serta Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan pada orang disangkakan telah melanggar melakukan pelanggaran

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwasanya penegakan hukum ialah sebagai suatu usaha yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan secara rasional serta untuk memenuhinya suatu rasa keadilan serta dapat berdaya guna. Dalam rangka penanggulangan kejahatan dilakukan melalui berbagai sarana sebagai reaksi yang diberikan pada pelaku kejahatan tersebut, reaksi tersebut dapat

---

<sup>23</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya : Putra Harsa, 1993, Hlm 23



berupa sarana pidana ataupun non hukum pidana. Apabila sarana pidana yang digunakan, berarti dilaksanakanlah politik hukum pidana yaitu dengan mengadakan pemilihan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan serta situasi pada waktu sekarang dan untuk juga masa-masa nanti<sup>24</sup>

Dari pendapat diatas tersebut, maka penegakan hukum sebagai suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya suatu norma hukum secara nyata, penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman melalui pidana ketika kejahatan itu sudah terjadi (Represif) tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat di luar hukum pidana yang menitikberatkan pada pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa atau sebelum kejahatan terjadi (Preventif). Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai yang memuat keadilan dan kebenaran, dimana penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum tetapi menjadi tugas dari setiap orang, disini diartikan bahwa semua orang memiliki peranan untuk membantu aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya tersebut.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, dimana yang *pertama* ditinjau dari sudut subyeknya, dimana dalam arti luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum, siapa-siapa saja yang telah menjalankan atau melakukan sesuatu atau dengan tidak melakukan

---

<sup>24</sup> Barda Nawari Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 109

sesuatu dengan mendasarkan dirinya pada norma-norma hukum yang berlaku itu artinya seseorang itu telah menegakkan suatu aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit itu penegakkan hukum hanyalah diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan jika aturan berjalan sebagaimana seharusnya. Kedua apabila ditinjau dari sudut obyek, penegak hukum dilihat dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai yang di dalamnya terkandung baik aturan formal serta nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk pengertian dalam arti sempit sendiri dimaksudkan bahwa penegakan hukum itu hanyalah terkait pada penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>25</sup>

### **2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Dengan dilakukannya penegakan hukum untuk dapat menjamin suatu kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwasanya ada macam-macam faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>26</sup>

#### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Meliputi semua peraturan dan kaidah atau norma tertulis yang dijadikan patokan oleh masyarakat untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman. Kelemahan atau kekurangan yang melekat

---

<sup>25</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm 32

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 13

pada faktor ini misalnya pada rumusan hukum yang tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam, kaidah hukum dengan yang lain mengenai hal yang sama namun bertentangan sehingga menimbulkan keragu-raguan

## 2. Faktor Aparat penegakan hukum

Faktor ini dimaksudkan bahwa diperlukan aparat penegak hukum baik yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum. dibutuhkan aparat penegak hukum yang handal dimana mentalitas, kepribadian dan ketrampilan profesional dari aparat itu sendiri juga menjadi peranan penting untuk keberhasilan penegakan hukum

## 3. Faktor fasilitas serta sarana yang memadai untuk menunjang dilakukannya penegakan hukum

Sarana atau fasilitas disini dapat mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki organisasi yang baik, peralatan-peralatan penunjang yang memadai, serta keuangan yang cukup. Tanpa adanya faktor ini penegakan hukum tentu tidak berjalan dengan lancar

## 4. Faktor masyarakat

Yang dimaksud ini ialah berlakunya hukum di suatu lingkungan orang-orang tertentu Masyarakat dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum, hal ini berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat kepada

hukum. Kepatuhan dan kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkn pada karsa manusiaa di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengert bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, esensi dari faktor penegakan hukum tersebut juga merupakan suatu tolak ukur efektif atau tidak suatu hukum berjalan. Hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya dan terdapat hal positif yang ditimbulkan. Dari lima faktor tersebut faktor aparat penegak hukum merupak titik sentral hal ini karena bak undang-undang disusun oleh aparat penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum juga menjadi panutan oleh masyarakat luas.

## **2.4 Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti suatu perbuatan melanggar sedangkan arti kata melanggar itu sendiri dapat berarti menubruk melawan dan menyalahi. Kata Pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar; tindak pidana yang lebih

ringan daripada kejahatan.<sup>27</sup> Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan, sanksi pelaku pelanggaran biasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi bagi pelaku kejahatan. Tidak ada penjelasan mengenai arti kata pelanggaran sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam istilah hukum pidana pelanggaran menunjukan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, melanggar hukum berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Pelanggaran diartikan sebagai delik undang-undang merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur. maka Suatu perbuatan dinyatakan telah melanggar atau dianggap sebagai pelanggaran jika perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan yang telah mengatur

Selanjutnya untuk pengertian Lalu lintas, dapat dilihat dalam undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan yang dimaksud dengan *lalu lintas adalah gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan*. Menurut W.J.S Poernwadarminta lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya<sup>28</sup>

Maka selanjutnya yang dimaksud Pelanggaran Lalu Lintas adalah tindakan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>

<sup>28</sup> Wirjono P Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia 2003 Bandung

undangan lalu lintas<sup>29</sup> sebagaimana diatur dalam pasal 105 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang ketentuannya berbunyi bahwa semua orang pengguna jalan wajib untuk melakukan perilaku yang tertib selama di jalan dan/atau tidak melakukan hal-hal seperti merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan suatu jalan.

Jika ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tersebut dilanggar maka dapat dikualifikasikan sebagai adanya suatu pelanggaran. Atas pelanggaran ini akan dilakukan penindakan atau tindakan hukum oleh petugas kepolisian secara edukatif maupun yuridis terhadap pelaku pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran menurut undang-undang No. 22 tahun 2009 dapat dibagi menjadi :

1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor
2. Pelanggaran terhadap cara berlalu lintas dan berkendara
3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas

Sedangkan tindak pidana kategori kejahatan dalam undang-undang ini adalah tindak pidana yang melanggar larangan juga tidak menjalankan kewajiban yang ada dalam undang-undang.

---

<sup>29</sup> Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.